

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi masih menjadi permasalahan mendasar dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap permasalahan tersebut. Kemiskinan tidak hanya menunjukkan rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi menunjukkan keterbatasan masyarakat dalam mengakses sumber daya ekonomi. Masyarakat berpendapatan rendah yang mengandalkan usaha mikro sebagai sumber penghidupan menghadapi kondisi yang lebih rentan. Keterbatasan modal dan akses terhadap sumber pembiayaan dapat menghambat keberlangsungan usaha mikro. Kondisi tersebut dapat meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 8,47 persen atau sekitar 23,85 juta jiwa berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenasi) Maret 2025 (BPS, 2025).

Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu wilayah yang perlu mendapat perhatian dalam penanganan kemiskinan. Jumlah penduduk yang besar menyebabkan persoalan kemiskinan di wilayah tersebut memiliki skala yang cukup signifikan. Badan Pusat Statistik Jawa Barat mencatat persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat sebesar 7,02 persen pada Maret 2025. Jumlah penduduk miskin pada periode tersebut mencapai sekitar 3,65 juta jiwa (BPS Jawa Barat, 2025). Persentase kemiskinan tersebut berada di bawah rata-rata nasional. Jumlah penduduk miskin secara absolut di Provinsi Jawa Barat masih tergolong

tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat memerlukan strategi yang tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan.

Kondisi kemiskinan juga terlihat pada tingkat perkotaan, termasuk di Kota Bandung. Kota Bandung menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan perkotaan di Provinsi Jawa Barat. Aktivitas perekonomian di Kota Bandung terus berkembang, tetapi perkembangan tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan kesejahteraan masyarakat. BPS Kota Bandung mencatat garis kemiskinan di Kota Bandung sebesar Rp644.417 per kapita per bulan pada tahun 2025 (BPS Kota Bandung, 2025). Garis kemiskinan tersebut menjadi batas minimum pengeluaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar. Masyarakat dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Biaya hidup perkotaan yang relatif tinggi juga dapat memberikan tekanan ekonomi yang lebih besar kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu kelompok masyarakat yang perlu mendapat perhatian dalam penanganan kemiskinan. Keterbatasan modal dan akses terhadap sumber daya produktif sering menghambat pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Kota Bandung menjadi wilayah yang relevan untuk melihat persoalan tersebut karena memiliki jumlah UMKM yang besar dan jenis usaha yang beragam. Dinas

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandung melalui Portal Satu Data Indonesia mencatat keberadaan usaha mikro pada berbagai sektor selama periode 2022–2024 (Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandung, 2024). Sebagian pelaku usaha mikro belum mampu memenuhi persyaratan pembiayaan dari lembaga perbankan. Persyaratan tersebut mencakup kepemilikan jaminan dan kelengkapan administrasi usaha secara formal. Kondisi tersebut mendorong sebagian pelaku usaha mikro untuk menggunakan sumber pembiayaan informal. Rentenir menjadi salah satu sumber pembiayaan informal yang digunakan oleh sebagian pelaku usaha mikro karena menawarkan kemudahan dalam memperoleh modal. Tingkat bunga yang tinggi dapat meningkatkan beban pembiayaan dan menghambat perkembangan usaha.

Pemerintah dan berbagai lembaga telah menjalankan upaya pemberdayaan untuk mengatasi kemiskinan dan keterbatasan akses ekonomi di Kota Bandung. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung. BAZNAS Kota Bandung memiliki tugas untuk menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas tersebut menempatkan BAZNAS Kota Bandung sebagai salah satu lembaga yang berperan dalam mengembangkan program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kondisi setempat. Kondisi perkotaan di Kota Bandung memiliki karakteristik yang kompleks karena tingginya aktivitas ekonomi dan urbanisasi. Kondisi tersebut

memberikan tantangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Masyarakat berpenghasilan rendah membutuhkan program yang tidak hanya memberikan bantuan secara langsung, tetapi meningkatkan kapasitas ekonomi secara berkelanjutan.

Pendayagunaan zakat secara produktif menjadi salah satu pendekatan pemberdayaan yang dikembangkan oleh BAZNAS Kota Bandung untuk menjawab kebutuhan masyarakat. BAZNAS Kota Bandung tidak hanya menyalurkan zakat untuk memenuhi kebutuhan konsumtif mustahik, tetapi mengembangkan berbagai program yang berorientasi pada penguatan kemandirian ekonomi. Program tersebut mencakup pemberdayaan pelaku usaha mikro di wilayah Kota Bandung (BAZNAS Kota Bandung, 2023). Kebijakan tersebut sejalan dengan visi BAZNAS yang menempatkan zakat sebagai instrumen pemberdayaan dan penguatan ekonomi umat. Visi tersebut mendorong perubahan posisi mustahik dari penerima bantuan menjadi pihak yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan kondisi ekonominya secara mandiri.

BAZNAS Kota Bandung mengembangkan Program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) sebagai salah satu program unggulan dalam pemberdayaan UMKM. Program BMD merupakan lembaga keuangan mikro non-profit yang menyediakan pembiayaan tanpa bunga melalui skema qardhul hasan bagi pelaku UMKM (BAZNAS Kota Bandung, 2024). Program tersebut membantu pelaku UMKM memperoleh akses terhadap modal usaha. Program

BMD juga bertujuan mengurangi ketergantungan pelaku UMKM terhadap sumber pembiayaan informal, khususnya rentenir.

Data mitra binaan yang telah tergabung dalam Program BMD dapat memperlihatkan skala pelaksanaan program tersebut di Kota Bandung, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Data Program BMD

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah Mitra Binaan	873 orang
2	Jumlah Kelompok Mitra BMD (KMD)	91 kelompok
3	Cakupan Kecamatan	15 kecamatan
4	Cakupan Kelurahan	37 kelurahan
5	Cakupan Wilayah	3 wilayah

Sumber: BAZNAS Kota Bandung, 2024

Data tersebut menunjukkan bahwa Program BMD telah menjangkau 873 orang mitra binaan yang tergabung dalam 91 kelompok, tersebar di 15 kecamatan, 37 kelurahan, dan mencakup 3 wilayah di Kota Bandung. Cakupan tersebut memperlihatkan bahwa Program BMD telah menjangkau sebagian besar wilayah Kota Bandung, sekaligus mengindikasikan skala pemberdayaan ekonomi berbasis zakat yang cukup luas. Data mengenai perkembangan usaha, pengalaman, dan pemaknaan mitra binaan terhadap proses pemberdayaan yang mereka jalani belum banyak terungkap, karena data yang tersedia secara publik masih terbatas pada aspek jumlah dan sebaran program.

Pemberdayaan pada dasarnya merupakan proses peningkatan kapasitas individu atau kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi kurang menguntungkan. Proses tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan

masyarakat dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Pemberdayaan dilakukan melalui penguatan kapasitas masyarakat dengan mendorong, membangkitkan, dan menumbuhkan motivasi terhadap potensi yang telah dimiliki. Masyarakat tidak ditempatkan sebagai pihak pasif yang hanya menerima bantuan, tetapi sebagai subjek yang memiliki kemampuan untuk berkembang secara mandiri (Zubaedi, 2013).

Pemberdayaan UMKM dalam perspektif ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada peningkatan keuntungan usaha. Pendekatan tersebut juga memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha secara mandiri melalui sistem ekonomi yang berkeadilan dan bebas dari praktik eksploitatif. Ekonomi syariah memiliki prinsip yang meliputi larangan riba, keadilan dalam transaksi, dan tanggung jawab sosial. Prinsip tersebut dapat menjadi landasan dalam membangun akses ekonomi yang lebih inklusif bagi pelaku UMKM. Pemberdayaan dalam perspektif ekonomi syariah memiliki tujuan yang lebih luas daripada peningkatan pendapatan. Pemberdayaan tersebut juga bertujuan membangun kemandirian individu agar mampu memenuhi kebutuhan hidup dan menentukan arah kehidupannya secara lebih baik.

Konsep pemberdayaan tersebut relevan dengan pola kerja Program BMD yang menempatkan zakat produktif sebagai instrumen untuk meningkatkan pendapatan mustahik melalui kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Asnaini (2008) menjelaskan bahwa dana zakat yang diterima tidak seluruhnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Dana

tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha untuk menghasilkan sumber pendapatan bagi mustahik. Pemanfaatan dana zakat sebagai modal usaha dapat membantu mustahik memenuhi kebutuhan hidup secara berkesinambungan. Pola tersebut menunjukkan adanya perubahan dari pemberian bantuan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek menuju pendayagunaan zakat yang mendorong kemandirian ekonomi. Mustahik tidak lagi ditempatkan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai pelaku yang berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan.

Kajian mengenai proses pemberdayaan tidak dapat dipisahkan dari peran pihak yang mendampingi masyarakat dalam pelaksanaannya di lapangan. Ife dan Tesoriero (2006) mengklasifikasikan peran pendamping dalam proses pemberdayaan menjadi empat kategori, yaitu peran fasilitatif, edukasional, representasi, dan teknis. Peran fasilitatif berkaitan dengan upaya mendorong keterlibatan aktif masyarakat melalui pemberian motivasi dan penguatan kapasitas kelompok binaan. Peran edukasional berkaitan dengan proses pemberian pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan masyarakat untuk mengelola usaha secara mandiri. Peran representasi berkaitan dengan fungsi pendamping dalam menjembatani kepentingan masyarakat dengan pihak eksternal. Pihak eksternal tersebut dapat mencakup lembaga penyedia modal dan jejaring pemasaran. Peran teknis mencakup pemberian pelatihan, penyusunan rencana usaha, dan pendampingan administratif yang bersifat praktis. Keempat peran tersebut perlu dijalankan secara menyeluruh agar proses pemberdayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran modal.

Pelaksanaan peran tersebut juga perlu mendorong kemandirian mitra binaan dalam jangka panjang.

Konsep peran pendamping tersebut menjadi acuan untuk menilai pelaksanaan Program BMD di lapangan. Pelaksanaan keempat peran tersebut oleh pendamping BMD terhadap mitra binaan UMKM di Kota Bandung belum banyak dikaji secara mendalam. Publikasi BAZNAS Kota Bandung lebih banyak menampilkan capaian program berdasarkan jumlah mitra dan cakupan wilayah. Publikasi tersebut belum memberikan gambaran yang memadai mengenai pelaksanaan peran fasilitatif, edukasional, representasi, dan teknis kepada mitra binaan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara pelaksanaan peran pendamping BMD di lapangan dengan konsep peran yang dikemukakan oleh Iff dan Tesoriero (2006). Kerangka teoritis mengenai peran dalam pemberdayaan masyarakat menjadi landasan untuk mengkaji pelaksanaan peran Program BMD dalam pemberdayaan UMKM binaan BAZNAS Kota Bandung. Kajian tersebut diarahkan untuk memahami berbagai bentuk peran yang dijalankan Program BMD dalam mendukung proses pemberdayaan UMKM.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pemanfaatan zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi UMKM. Menurut Tarisa dkk. (2025) mengkaji efektivitas pendistribusian dana zakat dalam pemberdayaan UMKM pada BAZNAS Kota Palembang. Penelitian tersebut menemukan bahwa pola pendayagunaan produktif tradisional dan produktif kreatif dinilai efektif berdasarkan ketepatan sasaran, sosialisasi program,

pencapaian tujuan, dan kegiatan monitoring. Penelitian Tarisa dkk. (2025) berfokus pada efektivitas pendistribusian dana zakat secara umum. Penelitian tersebut belum secara khusus menguraikan peran program *microfinance* berbasis zakat dalam keseluruhan proses pemberdayaan UMKM. Pengalaman UMKM sebagai penerima manfaat juga belum menjadi fokus utama penelitian tersebut. Menurut Azhar dkk. (2022) mengkaji pengaruh penyaluran zakat produktif terhadap peningkatan usaha mikro pada BMD Jabon Mekar dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian tersebut menemukan adanya pengaruh positif penyaluran zakat produktif terhadap peningkatan usaha mikro. Fokus penelitian pada hubungan sebab-akibat secara statistik belum memberikan gambaran mendalam mengenai proses pelaksanaan program. Penelitian tersebut juga belum menguraikan peran yang dijalankan oleh pendamping dalam proses pemberdayaan di lapangan.

Zakat produktif dan Program BMD memiliki potensi strategis dalam mendukung pemberdayaan UMKM. Potensi tersebut terlihat dari pelaksanaan Program BMD di Kota Bandung yang telah menjangkau ratusan mitra binaan di berbagai wilayah. Penelitian terdahulu masih banyak berfokus pada efektivitas dan pengaruh program dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Kajian yang secara khusus menempatkan BMD sebagai instrumen *microfinance* berbasis zakat dan mengkaji perannya dalam pemberdayaan UMKM di wilayah perkotaan masih terbatas. Kajian mengenai pengalaman UMKM binaan sebagai subjek utama pemberdayaan juga masih terbatas. Pendekatan kualitatif diperlukan untuk memahami proses sosial, interaksi, dan

pengalaman mustahik selama mengikuti program. Pendekatan tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peran BMD dalam pemberdayaan UMKM. Peran BMD tidak hanya dapat dilihat dari perubahan kondisi ekonomi penerima manfaat, tetapi dari proses pemberdayaan yang berlangsung selama program.

Karakteristik perkotaan Kota Bandung yang berbeda dari lokasi penelitian sebelumnya menjadi dasar untuk mengkaji peran Program BMD dalam konteks UMKM binaan BAZNAS Kota Bandung. Skala pelaksanaan program yang cukup luas belum diikuti oleh kajian yang mendalam mengenai proses pemberdayaan yang berlangsung di dalamnya. Kondisi tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan urgensi penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada proses pemberdayaan melalui kajian terhadap peran Program BAZNAS *Microfinance* Desa. Penelitian ini tidak hanya melihat hasil atau dampak ekonomi yang diterima oleh mitra binaan. Penelitian ini juga mengkaji peran program dalam mendorong proses pemberdayaan UMKM secara lebih menyeluruh. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Program BAZNAS *Microfinance* Desa dalam Pemberdayaan UMKM: Studi pada Usaha Mikro Binaan BAZNAS Kota Bandung”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pemberdayaan

UMKM melalui Program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD), khususnya pada usaha mikro binaan BAZNAS Kota Bandung, antara lain:

1. Pelaku usaha mikro di wilayah perkotaan, termasuk Kota Bandung, masih menghadapi keterbatasan akses permodalan dari lembaga keuangan formal. Sehingga menyebabkan ketergantungan pelaku usaha mikro terhadap pembiayaan informal, seperti rentenir, hal ini menjadi permasalahan struktural yang menghambat pengembangan usaha.
2. Implementasi Program BMD di Kota Bandung memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda dibandingkan wilayah pedesaan.
3. Belum adanya kajian yang secara mendalam mengungkap bagaimana peran Program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) dijalankan dalam proses pemberdayaan UMKM binaan, khususnya dalam konteks wilayah perkotaan seperti Kota Bandung, baik dari aspek pembiayaan, pendampingan, maupun pengalaman subjektif pelaku UMKM sebagai penerima manfaat.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas dari fokus yang telah ditetapkan, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dibatasi pada Program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Bandung.
2. Subjek penelitian adalah pelaksana program BMD dan UMKM binaan BAZNAS Kota Bandung yang menerima manfaat dari Program BMD.

3. Penelitian ini berfokus pada peran Program BMD dalam pemberdayaan UMKM, yang mencakup aspek pembiayaan, pendampingan, dan proses pemberdayaan yang dirasakan oleh pelaku UMKM.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) dalam pemberdayaan UMKM binaan BAZNAS Kota Bandung?
2. Bagaimana proses pelaksanaan Program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) dalam mendukung pemberdayaan UMKM binaan BAZNAS Kota Bandung?
3. Bagaimana dampak Program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) terhadap kegiatan usaha UMKM binaan?
4. Bagaimana tantangan dan hambatan pada Program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD)?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) dalam pemberdayaan UMKM binaan BAZNAS Kota Bandung.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pelaksanaan Program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) dalam mendukung pemberdayaan UMKM binaan BAZNAS Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak Program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) terhadap kegiatan usaha UMKM binaan.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis tantangan dan hambatan pada Program Baznas *Microfinance* Desa (BMD).

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu ekonomi Islam dan pemberdayaan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan zakat produktif dan *Microfinance* syariah antara lain:

- a. Penelitian ini memperkaya literatur ilmiah mengenai peran Program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) dalam pemberdayaan UMKM melalui pendekatan kualitatif, yang masih relatif terbatas terutama dalam konteks wilayah perkotaan.
- b. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji pemberdayaan UMKM berbasis zakat produktif dengan fokus pada peran program dan proses pemberdayaan.

- c. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman konseptual mengenai pemberdayaan UMKM sebagai upaya transformasi ekonomi mustahik menuju kemandirian.

Penelitian ini berkontribusi dalam memperluas perspektif akademik terkait implementasi zakat produktif dalam pembangunan ekonomi masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

- a. **Bagi BAZNAS Kota Bandung**, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam pengembangan serta penyempurnaan pelaksanaan Program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD), khususnya dalam aspek pendampingan dan pemberdayaan UMKM binaan.
- b. **Bagi pelaku UMKM binaan**, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai peran program BMD dalam mendukung pengembangan usaha dan meningkatkan kemandirian ekonomi.
- c. **Bagi pemerintah daerah** hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan UMKM berbasis zakat dan pembiayaan mikro yang berorientasi pada keadilan sosial.
- d. **Bagi lembaga pengelola zakat lainnya** penelitian ini juga dapat memberikan informasi dalam mengembangkan program pemberdayaan

	Bimbingan									
3.	Tahap Penyusunan									
	Penyelesaian Bimbingan									
	Sidang Munaqasyah									

Sumber: Data diolah Peneliti, 2026

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun dalam lima bab yang saling berkaitan dan disajikan secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan proses penelitian. Sistematika penulisan ini disusun untuk memudahkan pembaca dalam memahami alur pembahasan, mulai dari latar belakang permasalahan, landasan teori yang digunakan, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, hingga kesimpulan dan rekomendasi. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan merupakan bagian awal yang memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan. Bab ini memuat latar belakang penelitian yang menjelaskan kondisi dan permasalahan yang menjadi dasar dilakukannya penelitian mengenai peran Program BAZNAS *Microfinance* Desa dalam pemberdayaan UMKM di Kota Bandung. Selanjutnya, bab ini memuat identifikasi dan batasan masalah untuk memperjelas permasalahan yang menjadi fokus penelitian agar pembahasan tidak terlalu luas. Rumusan masalah disusun berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi dan menjadi dasar dalam menentukan arah penelitian. Bab ini juga memuat tujuan penelitian yang menjelaskan hasil yang ingin dicapai, manfaat penelitian yang terdiri atas manfaat teoritis dan praktis, serta

sistematika penulisan yang memberikan gambaran mengenai susunan dan isi setiap bab dalam skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi berbagai teori dan konsep yang menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi konsep peran, pengertian dan karakteristik Program BAZNAS *Microfinance* Desa, konsep pemberdayaan, pengertian dan karakteristik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta berbagai konsep lain yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan perbandingan dan sebagai dasar untuk menunjukkan posisi penelitian yang dilakukan. Pada bagian akhir bab ini disajikan kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antara konsep dan fokus penelitian sehingga dapat menjadi landasan dalam menganalisis peran Program BAZNAS *Microfinance* Desa dalam pemberdayaan UMKM di Kota Bandung.

Bab III Metodologi Penelitian menjelaskan tahapan dan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan penelitian. Bab ini mencakup jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode yang sesuai dengan karakteristik penelitian, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara sistematis untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Bab ini juga menjelaskan teknik pemeriksaan atau uji keabsahan data yang digunakan untuk

memastikan bahwa data dan informasi yang diperoleh dapat dipercaya serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan merupakan bagian utama yang menyajikan temuan penelitian berdasarkan data yang telah diperoleh dari lapangan. Pada bab ini terlebih dahulu disajikan gambaran umum mengenai lokasi penelitian, profil Program BAZNAS *Microfinance* Desa, serta karakteristik informan atau subjek penelitian yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya, hasil penelitian disajikan berdasarkan fokus dan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pembahasan diarahkan untuk menganalisis bagaimana peran Program BAZNAS *Microfinance* Desa dalam memberdayakan UMKM di Kota Bandung, termasuk bentuk pelaksanaan program, pendampingan, pemberian akses pembiayaan, serta perubahan atau perkembangan yang dirasakan oleh penerima manfaat. Temuan penelitian kemudian dianalisis dengan menghubungkannya dengan teori dan konsep yang telah diuraikan pada Bab II serta dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Dengan demikian, bab ini memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai hasil penelitian sekaligus menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab V Penutup merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan disusun berdasarkan temuan dan pembahasan pada bab sebelumnya serta diarahkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara ringkas dan sistematis. Selanjutnya, rekomendasi diberikan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan Program

BAZNAS *Microfinance* Desa, khususnya dalam upaya meningkatkan pemberdayaan UMKM di Kota Bandung. Rekomendasi juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya yang memiliki topik atau fokus kajian yang serupa.

